



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENAMBAHAN KUOTA PUPUK SUBSIDI UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN

Yosephus Mainake
Analisis Legislatif Ahli Muda
yosephus.mainake@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada tahun 2023 PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil merealisasikan 18,8 juta ton hasil produksi, yang terdiri dari pupuk 11,6 juta ton dan non-pupuk 7,1 ton. Berbagai upaya juga dikerjakan guna memastikan proses distribusi pupuk berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Mulai dari digitalisasi proses penebusan pupuk menggunakan aplikasi I-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) serta berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Aplikasi I-Pubers merupakan hasil kolaborasi Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian (Kementan). Aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan para petani dalam proses penebusan pupuk subsidi dengan menerapkan data yang terintegrasi di mitra distributor (kios) antara daftar penerima subsidi e-alokasi dengan data stok pupuk yang ada di Pupuk Indonesia. Per 1 Februari 2024, implementasi I-Pubers telah mencapai 100 persen secara nasional dan tersedia di lebih dari 27.000 kios di seluruh pelosok negeri.

Pemerintah resmi menetapkan kuota pupuk subsidi untuk tahun 2024 sebanyak 9,5 juta ton. Pada 19 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Terbatas terkait pangan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, memastikan segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai tambahan anggaran pupuk sebesar 9,5 juta ton.

Tahun 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp54 triliun untuk membiayai pengadaan pupuk bersubsidi. Anggaran tersebut melonjak dibandingkan anggaran pupuk subsidi pada tahun 2023 sebesar Rp25,3 triliun. Hal ini sejalan dengan kenaikan volume kuota yang sebelumnya hanya 6.19 juta ton. Sebelumnya, Pemerintah menganggarkan Rp14 triliun untuk menambah anggaran pupuk subsidi tahun 2024 yang awalnya ditetapkan sebesar Rp26,6 triliun. Namun, anggaran ini kembali dinaikkan dan telah dibahas dalam rapat bersama Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin oleh Kementerian Perekonomian.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menerangkan penambahan anggaran pupuk bersubsidi ini akan ditindaklanjuti dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Sejalan dengan itu, pengurusan anggaran belanja tambahan (ABT) juga sedang diproses di internal Kementan. Pada sisi lain, Rahmad Pribadi mengatakan bahwa pihaknya siap memasok 9,5 juta ton pupuk subsidi yang ditugaskan oleh pemerintah guna mewujudkan swasembada pangan. Langkah tersebut merupakan langkah tepat untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi yang cukup dan stabil bagi petani Indonesia. Dengan jumlah stok pupuk subsidi yang ada diharapkan mampu mendukung produktivitas pertanian Indonesia dan menopang ketahanan pangan nasional.

Atensi DPR

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengabarkan berita positif bagi para petani di seluruh Indonesia bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani memastikan akan segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai tambahan pupuk sebesar 9,5 juta ton. Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan kesiapan perusahaannya untuk menyediakan 9,5 juta ton pupuk subsidi sesuai penugasan pemerintah. Tujuan dari penugasan ini adalah untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan. Langkah ini dianggap strategis dalam memastikan pasokan pupuk subsidi yang memadai dan stabil untuk para petani di Indonesia. DPR RI, melalui fungsi pengawasan dan anggaran di Komisi VI perlu memastikan kesanggupan PT Pupuk Indonesia untuk memenuhi target penambahan kuota pupuk bersubsidi dan ketersediaan anggaran penambahan kuota pupuk subsidi. Di samping itu, Kementerian Pertanian juga perlu melakukan pengawasan ketat dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Sumber

antaranews.com, 15 Maret 2024;

Kontan, 20 Maret 2024;

Rakyat Merdeka, 21 Maret 2024;

sawitindonesia.com, 20 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

 @pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024